

DUGAAN PUNGLI HARUS DIUSUT TUNTAS, PENGAMAT: TUNJUKKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Kamis, 09 September 2021 - Arwifan Arsyad

FAJAR.CO.ID, [Â PINRANG](#) - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) gaji 13 dan THR di Kabupaten [Â Pinrang](#) masih terus jadi atensi [Â Ombudsman Sulsel](#). Setelah adanya klarifikasi dari terlapor, Ombudsman sisa menunggu tanggapan dari pelapor. Pengamat mendesak Pemda mengusut tuntas sebagai komitmen menunjukkan pemerintahan yang bersih.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer, mengaku, terkait progres dugaan [Â pungli](#) dengan terlapor Dinas Pendidikan dan BKUD Kabupaten [Â Pinrang](#), pihaknya telah mengirim surat permintaan tanggapan pelapor.

"Iya kami telah mengirimkan surat permintaan tanggapan kepada pelapor atas jawaban dari Pemkab [Â Pinrang](#) (Disdik & BKUD)," jelasnya, Rabu, 8 September 2021.

Lebih jauh, Subhan mengungkapkan, konteks penyelesaian dari laporan [Â pungli](#) tersebut bergantung dari terlapor. Kalau keinginannya sudah terpenuhi dan merasa puas dengan cara kepala daerah dalam menyikapi laporannya, maka laporan akan ditutup.

Pengamat Pemerintahan Unhas, Andi Lukman Irwan menyampaikan kasus dugaan [Â pungli](#) ini harus menjadi atensi kepala daerah atau bupati [Â Pinrang](#). Semestinya, harus ada penelusuran oleh inspektorat untuk membuktikan ada atau tidaknya [Â pungli](#).

"Harus diusut tuntas, betul tidaknya itu [Â pungli](#). Seberapa pun besarnya atau mengatasnamakan apa pun misalnya uang terima kasih atau sejenisnya," tegasnya.

Lukman menegaskan, langkah Bupati [Â Pinrang](#), Irwan Hamid untuk mengusut tuntas dugaan [Â pungli](#) akan menjadi preseden bagaimana sang kepala daerah menjalankan pemerintahan.

"Ini akan menunjukkan marwah pemerintahan. Pak Bupati harus turunkan inspektorat mengusut. Itu bukti bahwa ia menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Apalagi ini periode pertama menjabat," imbuhnya. (abd)